

**PENGARUH BELANJA DAERAH BERDASARKAN KLASIFIKASI EKONOMI TERHADAP  
PENGENTASAN KEMISKINAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2007-2012**

oleh :

**Desi Suryati**

Dosen pada Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

**Abstrak:** Studi ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007-2012. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah ekonometrika dengan data panel dengan menggunakan analisis data panel yang meliputi data *time series* mulai dari periode tahun 2007–2012 dan data *cross section* meliputi 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fokus penelitian ini adalah pada alokasi belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi untuk melihat pengaruhnya terhadap penurunan angka kemiskinan dan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil estimasi menunjukkan bahwa berdasarkan klasifikasi ekonomi maka variable belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dengan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,749 yang berarti bahwa variabel Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal memberikan variasi penjelasan sebesar 74,9% terhadap kemiskinan. Sedangkan 25,1% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi. Sementara nilai F stat sebesar 11,725 artinya nilai F stat > F table (11,725 > 10,13) pada  $\alpha = 5\%$  bermakna bahwa semua variable belanja baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal memberikan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan walaupun ada variable yang tidak signifikan. Belanja pegawai pengaruhnya positif dan signifikan, belanja barang jasa berpengaruh negative tapi signifikan, dan belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan karena tidak sesuai dengan harapan. Sementara itu berdasarkan klasifikasi ekonomi, variable belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,946 yang berarti bahwa variabel Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal memberikan variasi penjelasan sebesar 94,6% terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan 5,4% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi. Sementara nilai F stat sebesar 69,42 artinya nilai F stat > F table (69,42 > 10,13) pada  $\alpha = 5\%$  bermakna bahwa semua variable belanja baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja pegawai berpengaruh negative dan tidak signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan serta belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan.

**Kata Kunci :** *Belanja Daerah, klasifikasi ekonomi, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia*

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan keharusan bagi kelangsungan hidup suatu negara. Mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh sebuah negara yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan Sumber Daya Manusia mencakup peningkatan kemandirian dan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kapasitas dasar menurut

Todaro (2003) yang sekaligus merupakan tiga nilai pokok keberhasilan pembangunan ekonomi adalah kecukupan (*sustenance*), jati diri (*selfsteem*), serta kebebasan (*freedom*). Kecukupan dalam hal ini merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini tercermin dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Perekonomian Indonesia mengalami kemajuan dari tahun 2001 ke tahun 2009, walaupun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini perekonomian nasional sering dihadapkan pada

masalah krisis perekonomian dunia. Tingginya tingkat pertumbuhan nasional saat ini tidak dibarengi dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2008 mencapai 15,42% sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi 6,38% yang cenderung mengalami trend positif disaat terjadinya krisis ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan yang tinggi tidak dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan (BPS, 2009).

Selain itu Indonesia juga menghadapi masalah lainnya yaitu masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, hal ini merupakan masalah yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi semua masyarakat Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari *Human Development Index* (HDI) atau yang lebih dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Pembangunan tiga aspek yang menjadi fokus perhatian dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan sinergi di antara ketiganya. Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Anand, 1993). Pentingnya peran tersebut tidak terlepas dari tiga fungsi pemerintah, yaitu memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak mampudisediakan oleh pihak swasta, seperti misalnya jalan, dam, dan sarana publik lainnya (Azril, 2000).

Salah satu perangkat yang selama ini banyak digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan peran tersebut adalah perangkat kebijakan fiskal. Di antara instrumen kebijakan fiskal tersebut, ada instrumen dalam bidang pengalokasian dana atau anggaran pembangunan ke bidang yang berkaitan dengan dengan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, irigasi, transportasi, dan sebagainya (Sasana, 2009). Komponen anggaran pembangunan ini mencakup belanja-belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Komponen belanja tidak langsung itu yakni belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa,

belanja bagi hasil pajak pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, dan belanja tidak terduga. Sementara Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 901,50 miliar, direncanakan menjadi Rp 655,95 miliar pada tahun 2013. Berkurang Rp 245,54 miliar, atau 27,24 persen. Penurunan ini disebabkan beberapa program pada tahun 2012 telah memenuhi target pencapaian, sehingga kebijakan belanja langsung, khususnya program strategis, anggarannya diarahkan untuk penyempurnaan pencapaian target pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2013.

Sejak tiga tahun terakhir Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya untuk mempercepat peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia. Dalam jangka waktu tiga tahun terakhir (2010-2012), percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 2,79% yang menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati urutan ke-6 secara nasional dari percepatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia tidak jauh dari lingkup kemiskinan sehingga dalam pengembangan Indeks Pembangunan Manusia maka akan terjadi penurunan angka kemiskinan.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin di suatu wilayah perekonomian tertentu. Berdasarkan data jumlah dan persentase kemiskinan tahun 2007 dan 2012, diketahui bahwa terdapat penurunan baik jumlah penduduk miskin maupun prosentase kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk miskin menurun dari 1.118.452 orang pada tahun 2007 menjadi 828.234 orang pada tahun 2012, sedangkan prosentasenya menurun dari 24,99% pada tahun 2007 menjadi 18,00% pada tahun 2012. Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi tahun 2007, sedangkan Kota Bima adalah yang terendah pada tahun yang sama. Sementara untuk kabupaten dan kota lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, rata-rata mengalami penurunan prosentase kemiskinan. Hal ini terlihat dari angka angka prosentase yang terdapat selama periode tahun 2007 sampai dengan periode tahun 2012, begitu pula dengan Kabupaten Lombok utara yang baru dibentuk dengan angka prosentase pada tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan juga. Hal ini merupakan upaya dan target utama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara barat dalam upaya pengentasan kemiskinan sehingga kue pembangunan dapat dibagi dengan adil antara

kabupaten dan kota yang ada. Rata-rata penurunan prosentase kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,4 % setiap tahunnya. Walaupun nilai penurunannya tidak terlalu besar namun setidaknya dalam setiap tahun terjadi perubahan dalam prosentase kemiskinan.

Program pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat yang menyentuh langsung kepada masyarakat miskin. Ada beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti program AKINO (Angka Kematian Ibu Menuju Nol), ADONO (Angka Drop Out Menuju Nol), ABSANO (Angka Buta Aksara Menuju Nol), Beasiswa Berprestasi, Rehab Rumah Kumuh, PIJAR (Pengembangan Budidaya Sapi, Jagung dan Rumput Laut), Lumbung Bersaing, Pengembangan industri kreatif, Pengembangan Industri Berbasis Bahan Baku Lokal, Pengembangan Pariwisata (Visit Lombok Sumbawa), Percepatan Infrastruktur dan lain-lain. Berbagai program pembangunan daerah dengan sumber dana dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki andil besar terhadap penurunan angka kemiskinan. Anggaran yang dikeluarkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu indikator untuk pengembangan sumber daya manusia karena Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator penting untuk mengetahui keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat/penduduk.

Berdasarkan data yang dipublikasikan secara berkala oleh BPS bahwa ranking Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Barat berada pada urutan 30 dari 30 provinsi tahun 2007 dengan nilai 63,71 dan sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 selalu di posisi 32 dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia 64,12 pada tahun 2008, 64,66 pada tahun 2009, sementara pada tahun 2010 Indeks Pembangunan Manusia 65,20, pada tahun 2011 sebesar 66,23 dan terakhir tahun 2012 dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,89.

Bila dilihat dari ranking, posisi Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Barat memang tidak mengalami perubahan walaupun capaian nilainya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena provinsi lainnya pada hakekatnya juga berupaya untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia dan untuk memenuhi ini setiap provinsi berupaya mengerahkan seluruh sumber daya (terutama anggaran) yang dimilikinya. Selain indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia seperti bidang pendidikan dan kesehatan juga terdapat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu pada bidang pertanian. Sektor

pertanian merupakan salah satu sektor yang mendominasi mata pencaharian penduduk secara mayoritas karena Indonesia adalah negara agraris begitu pula halnya dengan wilayah Nusa Tenggara Barat. Salah satu sektor utama yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengelolaan anggaran yaitu pada sektor pertanian. Pengeluaran atau belanja pemerintah pada bidang pertanian dapat mempengaruhi kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.

Sudut pandang pendekatan kebutuhan dasar menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yakni dengan melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, yang terdiri dari pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi, dalam hal ini yang menjadi perhatian pada pangan yang akan terpenuhi melalui sektor pertanian. Semakin meningkat hasil produksi atau output dari sektor pertanian maka akan menunjukkan keberhasilan dan kemakmuran dari masyarakat yang bersangkutan dan ini sangat besar pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang ada. Apabila pemenuhan kebutuhan dasar ini tercukupi dengan baik maka pola pikir masyarakat yang terbentuk akan semakin maksimal untuk berproduksi.

Bentuk pengeluaran atau belanja pemerintah daerah terhadap sektor pertanian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan penyediaan alat, sarana dan prasarana pertanian yang mendukung kegiatan pemerintah di bidang pertanian sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan output terhadap hasil pertanian. Bila hal ini berjalan sesuai dengan sarannya maka akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan khususnya pada bidang pertanian. Selain penyediaan sarana dan prasarana, pemberian subsidi pertanian seperti subsidi pupuk juga bisa dilakukan mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat akan hal tersebut. Salah satu kendala dalam kegiatan sektor pertanian adalah kurang tersedianya kebutuhan masyarakat tani akan pupuk. Bila hal ini tidak diseimbangkan dengan kebutuhan masyarakat tani atau petani maka output yang dihasilkan juga tidak akan maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin menganalisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007-2012.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonometrika dengan menggunakan analisis data panel yang meliputi data *time series* mulai dari periode tahun 2007–2012 dan data *cross section* meliputi 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis data adalah data sekunder. Fokus penelitian ini adalah pada alokasi belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi untuk melihat pengaruhnya terhadap penurunan angka kemiskinan dan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia. Penggunaan model data panel juga harus memenuhi asumsi klasik, yaitu: Uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan permodelan yang dihasilkan dari hasil estimasi maka perlu dijelaskan parameter-parameternya. Sehingga mampu dimaknai kejelasan dan kesesuaian arah dengan hipotesis yang telah diajukan berdasarkan teori ekonomi dalam pembahasan ini. Selain itu juga dapat dilihat masing-masing pengaruh dari belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama jangka waktu 2007-2012.

### a. Pengaruh belanja daerah klasifikasi ekonomi terhadap Kemiskinan

Adapun hasil estimasi yang ditunjukkan oleh belanja daerah klasifikasi ekonomi terhadap kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kit} &= -0.177601 + 0.325050 \text{ BPEG} - 0.408710 \text{ BBJ} + 0.205025 \text{ BM} + \varepsilon \\ t\text{-stat} &= (-0.24402) \quad (3.824251) \quad (-3.528293) \quad (1.586435) \\ \text{Prob.} &= (0.8083) \quad (0,0004) \quad (0,0009) \quad (0,1193) \\ R^2 &= 0,749609 \quad F\text{-stat} = 11,72551 \\ \text{DW stat} &= 2,385667 \end{aligned}$$

Sebagaimana diketahui bahwa belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal merupakan bagian dari belanja yang mendukung kegiatan pembangunan dalam hal ini salah satunya adalah dalam upaya pengentasan kemiskinan walaupun berdasarkan analisis model yang diperoleh terdapat juga belanja yang memberikan pengaruh yang signifikan namun tidak sesuai dengan harapan terhadap penurunan angka kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Penurunan angka kemiskinan adalah salah satu program nasional yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dana untuk program ini tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

tapi juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun perlu juga diketahui pengalokasian dana yang ditujukan untuk pengentasan atau penurunan angka kemiskinan ini yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Misalnya belanja pegawai dan belanja modal tidak berhubungan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau bisa dikatakan pengeluaran pemerintah berupa belanja pegawai tidak pro terhadap rakyat miskin sehingga apabila dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan maka belanja pengeluaran pemerintah dalam bidang belanja pegawai tidak efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, untuk itu pengeluaran belanja pegawai ini kalau ditingkatkan maka akan tidak tepat sasaran dalam menurunkan kemiskinan, hal ini akan dinikmati oleh golongan menengah keatas. Namun berbeda halnya dengan belanja daerah seperti belanja barang dan jasa yang memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Artinya setiap peningkatan terhadap pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran untuk barang dan jasa akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kota Bima adalah salah satu kota yang digunakan sebagai variable dummy dalam permodelan ini mengingat Kota Bima merupakan salah satu kota yang paling kecil angka kemiskinannya bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu agar tidak terjadi kerancuan dalam data yang dianalisis maka Kota Bima dijadikan sebagai variable dummynya, karena Kota Bima merupakan kota yang relative angka kemiskinannya paling rendah dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal memberikan pengaruh yang berbeda terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat terlihat dari hasil estimasi atau regresi dalam analisis bahwa belanja pegawai berkorelasi positif artinya kenaikan belanja pegawai berhubungan lurus dengan angka kemiskinan namun kenaikan ini tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten /Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat karena pada komponen Belanja Pegawai pada Belanja Langsung dalam struktur pengalokasian anggarannya tidak terfokus pada anggaran untuk pengentasan kemiskinan tapi belanja pegawai ini pengalokasiannya lebih banyak

untuk pembiayaan anggaran yang lainnya seperti digunakan untuk menganggarkan belanja honorarium, lembur dan tunjangan pegawai negeri sipil. Sehingga dalam hal ini belanja pegawai ini lebih banyak dinikmati oleh kalangan pejabat-pejabat Negara atau daerah serta aparatur-aparaturannya, sehingga kalau dikaitkan dengan masalah pengentasan kemiskinan maka belanja pegawai ini tidak efektif dalam pengentasan kemiskinan hal ini dikarenakan apabila semakin ditingkatkan belanja pegawai ini justru yang menikmati dari peningkatan ini adalah para pejabat serta para aparatur pemerintah dimana pejabat serta aparatur pemerintah ini notabene merupakan golongan menengah keatas, bukan golongan masyarakat bawah atau masyarakat miskin yang hanya menikmati sebagian kecil dari anggaran, untuk itu belanja pegawai ini memiliki hubungan positif dengan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Belanja barang dan jasa memberikan pengaruh negative terhadap penurunan angka kemiskinan dan belanja ini memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat artinya bahwa semakin besar belanja barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga akan mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Kaitannya dengan hubungan antara belanja barang dan jasa ini terhadap penurunan kemiskinan, bahwa belanja barang dan jasa seperti belanja untuk keperluan kantor, serta pembelian barang serta jasa, hal ini memiliki hubungan negative tetapi tidak signifikan, terkait dengan teori yang dibangun bahwa belanja barang serta keperluan kantor ini akan meningkatkan produksi, peningkatan terhadap produksi ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap tenaga kerja sehingga apabila semakin ditingkatkan pengeluaran untuk pembelian barang maka hal ini akan berdampak terhadap produksi dan penyerapan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang bekerja dan memiliki pendapatan sehingga akan menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan, tetapi kalau dikaitkan dengan efektif tidaknya pengeluaran pemerintah tersebut maka pengeluaran untuk belanja barang dan jasa ini tidak efektif untuk pengentasan kemiskinan karena siklus atau proses yang dilalui tidak langsung menyentuh masyarakat miskin, sehingga pengeluaran pemerintah untuk belanja barang dan jasa ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Sedangkan untuk belanja modal merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang ditujukan dalam rangka menambah atau memperoleh asset

tetap dan asset-aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap maupun asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Asset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual. Sehingga kalau dikaji atau dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan maka pengeluaran pemerintah berupa belanja modal ini tidak sesuai dengan upaya dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu pengeluaran pemerintah berupa belanja modal kurang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hal ini dikarenakan pada belanja modal pengalokasian belanjanya yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah daerah dalam upaya penurunan angka kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Besar kecilnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan seperti perumusan standar kemiskinan, dan penyusunan peta-peta kantong kemiskinan serta penyediaan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian bantuan dana langsung tunai

maupun non tunai, pembangunan infrastruktur di pemukiman kumuh, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini bahkan untuk wilayah Indonesia masih belum membuahkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Masih banyak penduduk atau masyarakat baik di desa maupun di kota yang hidup dibelut kemiskinan, disisi lain fakta tak bisa diingkari bahwa kendati jumlah orang miskin menurun namun kesenjangan dalam banyak hal justru semakin melebar.

Menurut Mubyarto (1985) dalam Bagong Suyanto (16 : 2013), pemberian bantuan ekonomi untuk jangka pendek sangat bermanfaat bagi pengurangan angka kemiskinan namun untuk jangka panjang, bantuan ekonomi tidak akan menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara tuntas. Banyak bukti yang menyatakan bahwa pemberian bantuan ekonomi saja ternyata justru melahirkan problem-problem baru yang tidak kalah ruwetnya. Bahkan tidak mustahil terjadi diperolehnya bantuan modal pinjaman kredit justru akan menjadi titik awal dari macam-macam masalah lain dan kehancuran usaha masyarakat miskin.

#### **b. Pengaruh belanja daerah klasifikasi ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).**

Adapun hasil estimasi yang diperoleh berdasarkan pengolahan data atas pengaruh belanja daerah klasifikasi ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :

IPM	=	3.291019	-	0.011150	BPEG	+	0.045316	BBJ	+	0.004694	BM	+ ε
t-stat	=	(12,4131)		(-1,401916)			(5,359967)			(0,489946)		
Prob.	=	(0,0000)		(0,1675)			(0,0000)			(0,6265)		
R <sup>2</sup>	=	0,946594										
DW stat	=	1,575884					F-stat = 69,42059					

Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai variable dummy adalah Kota Mataram, karena nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Mataram adalah yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu digunakan sebagai *benchmark* atau variable acuan untuk mengestimasi besarnya Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Nusa Tenggara Barat agar tidak terjadi kerancuan dalam mengestimasi. Kota Mataram merupakan ibu kota Propinsi sehingga semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan terpusat di ibu kota.

Pemusatan kegiatan di ibu kota ini membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik

dan lancar berbeda dengan Kabupaten/Kota yang tidak dipusatkan sebagai kegiatan pemerintahan Provinsi. Oleh karenanya membutuhkan kekuatan sumber daya yang besar baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya sehingga penyerapan faktor produksi menjadi lebih besar pula bahkan mampu untuk mencapai full employment

Berdasarkan tabel, kegiatan belanja barang dan jasa serta belanja modal akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga terjadi kenaikan pada aktivitas masyarakat yang nantinya akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka tingkat kesejahteraannya akan semakin meningkat pula, sehingga masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Peningkatan pendapatan akan mampu untuk meningkatkan alokasi pendapatan dalam kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier sehingga masyarakat akan menjadi lebih sehat, lebih pintar dan lebih sejahtera. Apabila ketiga komponen ini terpenuhi maka secara otomatis akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia karena pendidikan, kesehatan maupun daya beli ini merupakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan dalam pengolahan data maka dapat dilihat bahwa belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi yang mencakup belanja pegawai belanja barang dan jasa, serta belanja modal memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk belanja pegawai berkorelasi negative dan tidak signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan parameter hasil estimasi. Hal ini dikarenakan anggaran yang teralokasi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, hal ini juga diakibatkan belanja pegawai tidak berkorelasi secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Barat. Anggaran yang ada lebih ditekankan pada kegiatan yang lain sehingga dalam pengalokasian untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tidak sesuai dengan harapan anggaran yang tersedia. Apabila dikaitkan serta dikaji keterkaitan antara belanja pegawai dengan Indeks Pembangunan Manusia, bahwa sasaran untuk belanja pegawai ini adalah lebih banyak untuk golongan menengah ke atas sehingga peningkatan terhadap atau dampak kesejahteraannya hanya mencakup golongan menengah ke atas sehingga belanja pegawai ini tidak efektif dalam meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia. Sementara itu pada belanja barang dan jasa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Barat, hal ini dikarenakan bahwa walaupun pengalokasian dana ini tidak dinikmati pada awal anggaran namun dapat dicapai pada akhir tahun anggaran sehingga terlihat korelasi dan pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu pada belanja modal memberikan pengaruh yang positif tapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Barat. Hal ini juga diakibatkan karena pengalokasian anggaran yang ada lebih banyak difokuskan pada anggaran kegiatan yang lain yang mengakibatkan target yang mestinya diinginkan untuk bisa tercapai tidak bisa tercapai dengan baik, karena fokus kegiatan tidak hanya pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, namun juga diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini program yang dilaksanakan tidak hanya terfokus pada satu kegiatan saja namun juga terdapat banyak kegiatan lain yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hal ini senada dengan teori yang disampaikan oleh Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa anggaran belanja negara memang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kebijakan dan pengeluaran pemerintah diarahkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Belanja langsung yang merupakan pengeluaran pemerintah yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran daerah sekarang ini terbagi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam bentuk belanja langsung pengeluaran dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum atau program-program langsung yang dapat merangsang produktivitas yang lebih besar bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah. Selain itu belanja pemerintah daerah juga diperuntukkan bagi layanan dasar yang harus diperoleh masyarakat. Dengan alokasi belanja langsung yang tepat maka pembenahan infrastruktur daerah serta fasilitas umum akan tetap baik, sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitasnya serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara konseptual belanja tidak langsung memang tidak atau kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat umum dalam menjalankan usaha mereka. Namun demikian dengan alokasi penggunaan belanja tidak langsung secara tepat,

akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Th. XIII/25/April-Juni 2004*. Yogyakarta. Hlm. 90-109
- Biro Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, 2012.
- Gujarati, Damodar, 2004. *Ekonometrika Dasar*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Islamy, Triandi Darma, 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Studi di Kabupaten/Kota Kawasan Tapal Kuda) Tahun 2006-2010*. Trunojoyo Journal Of Economics Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.
- Mirza, Denni Sulistio, 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*. Economic Development Analisis Journal. EDAJ 1. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan Pelaporan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Situs Resmi Pemerintah Kota Mataram, [www.mataramkota.go.id](http://www.mataramkota.go.id)
- Sasana, Hadi. 2006. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Daerah serta Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Disertasi*. Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Taryono, 2012. *Analisis Belanja Daerah, Kemiskinan, Kesejahteraan Masyarakat*

*AntaraKabupaten/Kota penghasil Migas dan bukan Penghasil di Propinsi Riau. JURNAL SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN Tahun III No. 7, November 2012 : 52 -70.*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah.*

